



Minta SKPD Tindaklanjuti Temuan

KUBU RAYA, TRIBUN - Kepala Inspektorat Kubu Raya Damhuri meminta kepada seluruh SKPD untuk dapat menindaklanjuti temuan di dalam pengelolaan keuangan masing-masing. Karena dalam penyelenggaraan pemerintah harus mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Terdapat beberapa SKPD yang masih perlu mendapatkan rekomendasi untuk melakukan perbaikan terhadap laporan keuangan. Ada juga SKPD yang telah kita periksa sudah baik dan tidak ada temuan dalam pelaksanaan pemerintahannya," terang Damhuri, belum lama ini.

Kendati demikian pihaknya tetap melakukan pemeriksaan secara lebih lanjut, agar ke depan tidak lagi mengulang kesalahan sebelum-

nya. "Dari 14 SKPD di Kubu Raya yang dilakukan pemeriksaan hanya terjadi kesalahan di dalam pengelolaan administrasinya, dan segera dilakukan perbaikan," tambahnya.

Terkait dengan pengelolaan keuangan itu, Wakil Bupati Kubu Raya Hermanus akan melakukan pengawasan dan pemutakhiran data hasil pengelolaan keuangan oleh Inspektorat Kubu Raya. Pihaknya ingin memberikan informasi kepada para SKPD untuk segera menyelesaikan segala bentuk laporan baik yang bersifat administratif maupun Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Terkait penanganan TGR kedepan akan diadakan rapat yang membahas secara khusus untuk agar bisa dikembalikan terhadap kerugian negara atau daerah.

"Kegiatan ini diharapkan

dapat mengembalikan temuan-temuan dalam kaitan dengan kerugian daerah pada Pemerintah. Jika ini dapat dilakukan, dapat mewujudkan pemerintahan yang semakin baik dan bersih," katanya

Hermanus juga minta kepada Inspektorat untuk melakukan review terhadap perencanaan dalam RKA masing-masing SKPD pada tahun 2015 ini untuk dilakukan verifikasi terhadap program kegiatan yang dilakukan. apakah sudah sesuai dengan tupoksi dan apakah penganggarannya telah sesuai dengan satuan harga. "Jika pengawasan dapat dilakukan secara efektif, temuan-temuan mungkin terjadi dapat segera diminimalisir," katanya

Sebab, lanjut Hermanus dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah dae-

rah itu akan diaudit oleh BPK. Dari audit itulah akan ditentukan penilaian, apakah hasilnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP), atau malah disclaimer.

Hermanus menambahkan jika meminimalisir temuan-temuan yang terjadi di lapangan, di dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang akan diaudit oleh BPK. karena hasil dari audit BPK inilah nantinya akan menentukan opini penilaian dari BPK, baik itu WTP, WDP atau malah disclaimer.

"Keinginan kita untuk mempertahankan opini dari BPK yakni WTP, sehingga kita perlu melakukan terus pengawasan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan pelaksanaan hingga laporan dilakukan secara simultan," tandasnya. (dan)